

## PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KECAMATAN AMURANG TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN

*Anderson Mamangkey<sup>1</sup>  
Johny Lumolos<sup>2</sup>  
Fanley Pangemanan<sup>3</sup>*

### Abstrak

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Di Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berlaku sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2018. Pada tahun 2017 ada 8 Desa dan pada tahun 2018 ada 12 Desa dan 2 Kelurahan. Tahun 2017 berjumlah 387 unit dan pada tahun 2018 450 unit yang di salurkan. Di Kecamatan Amurang Timur terdapat 1 Desa dan 1 Kelurahan yang menerima bantuan BSPS. Pada tahun 2017 di Desa Maluku menerima dengan jumlah 52 unit dan pada tahun 2018 di Kelurahan Pondang menerima dengan jumlah 35 Unit. Bantuan BSPS yaitu dalam bentuk uang. Dari hasil pengamatan awal peneliti mengamati adanya fenomena-fenomena dalam pelaksanaan program pemerintah ini yaitu, adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya pengawasan dari Dinas yang terkait, juga kurangnya mengamati pelaksanaan program BSPS dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Di lain pihak kendala di lapangan seperti kurangnya Swadaya dari penerima bantuan, suplay bahan dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan, kurangnya kerja sama antar anggota dan kelompok, harga bahan bangunan yang tiba-tiba naik. Kemudian didapati di lapangan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mampu namun menerima program BSPS dikarenakan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pihak Fasilitator. Ada tiga unsur penting dan mutlak yang menunjang pelaksanaan yaitu, adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan, Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Program BSPS.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah program pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disingkat MBR. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Di Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berlaku sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2018. Pada tahun 2017 ada 8 Desa dan pada tahun 2018 ada 12 Desa dan 2 Kelurahan. Tahun 2017 berjumlah 387 unit dan pada tahun 2018 450 unit yang di salurkan. Di Kecamatan Amurang Timur terdapat 1 Desa dan 1 Kelurahan yang menerima bantuan BSPS. Pada tahun 2017 di Desa Maluku menerima dengan jumlah 52 unit dan pada tahun 2018 di Kelurahan Pondang menerima dengan jumlah 35 Unit. Bantuan BSPS yaitu dalam bentuk uang. Penunjukan Desa Maluku dan Kelurahan Pondang yaitu karena diperlukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan telah memasukan proposal di Dinas

Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kabupaten Minahasa Selatan dan melalui proposal yang sudah dimasukkan sudah di verifikasi oleh pegawai di Dinas tersebut.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terealisasi di Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur. Masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak huni dan hidup dengan sejahtera. Dalam pelaksanaan program pemerintah ini ada permasalahan yang muncul yaitu, adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya pengawasan dari Dinas yang terkait, juga kurangnya mengamati pelaksanaan program BSPS dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Di lain pihak kendala di lapangan seperti kurangnya Swadaya dari penerima bantuan, suplay bahan dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan, kurangnya kerja sama antar anggota dan kelompok, harga bahan bangunan yang tiba-tiba naik. Kemudian didapati di lapangan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mampu namun menerima program BSPS dikarenakan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pihak Fasilitator.

Untuk keberlangsungan program BSPS agar berjalan dengan baik, seharusnya pelaksanaan program di lapangan berlaku sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Program BSPS dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Provinsi dan unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat melibatkan Dinas. Dalam hal ini Dinas yang dimaksud di ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat. Kegiatan BSPS dilakukan pada tahap pengusulan lokasi, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon penerima BSPS, pencairan, penyaluran, pemanfaatan BSPS dan pelaporan.

## Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti bautan, sifat, dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi pelaksanaan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. (Nurdin Usman, 2002:70).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah di rumuskan dan di tetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan,

alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya di mulai dan bagaimana caran yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun atau operasional kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan program menurut Abdulah Syukur (2007:40) adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi yaitu merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana
- b. Resouces (Sumber daya) yaitu dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau wewenang yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
- c. Disposisi yaitu sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program
- d. Struktur birokrasi yaitu SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur tata aliran dalam

pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam pencapaian hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak menurut Abdulah Syukur (2007:41 yaitu :

- a. Adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

## Metode Penelitian

Dalam desain penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Creswell (2013:4-5) mendefinisikan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang di anggap yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang

spesifik dan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Moleong menjelaskan bahwa tujuan penelitian jenis ini adalah membuat deskripsi atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki dan menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan variabel penelitian yang diteliti (Moleong, 2017:157).

Fokus dalam penelitian ini melihat Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Dengan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Adanya program (Kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2017:158), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ialah *Kata-kata dan Tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan dengan cara *Key Person*, dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informasi penelitian (Bungin, 2011:77). Dengan demikian, informan yang hendak di wawancarai yaitu:

- a. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- b. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- c. Kepala Bidang Perumahan
- d. Koordinator Fasilitator Lapangan Kecamatan Amurang Timur
- e. Masyarakat Penerima BSPS di Desa Maluku : 2 orang
- f. Masyarakat Penerima BSPS di Kelurahan Pondang : 2 orang

Data akan dilakukan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan studi dokumen (Sugiyono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat mengetahui pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan

## Hasil Penelitian

Program bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sudah diterima oleh sebagian masyarakat di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan dikarenakan Desa Maluku dan Kelurahan Pondang yang telah memasukan proposal dan diterima oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan satu tahun sebelum pelaksanaan. Sehingga Desa Maluku pada tahun 2017 menerima 52 unit dan Kelurahan Pondang pada Tahun 2018 menerima 35 unit.

Program BSPS yang sudah tersalur di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang diterima oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Akan tetapi, Semua Masyarakat yang

berpenghasilan rendah tidak semua mendapat bantuan. Karena program BSPS mempunyai kuota batas yang diterima oleh Desa dan Kelurahan penerima. Namun, respon dari masyarakat penerima program BSPS sangatlah senang dan berterima kasih banyak kepada pemerintah atas bantuan yang membantu mereka mendapatkan rumah yang layak huni. Pihak Dinas Perumahan dan Perumahan Rakyat memaparkan dan menjelaskan kepada penerima-penerima bahwa program ini memerlukan swadaya dari masyarakat penerima bantuan itu sendiri. Tetapi, yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya swadaya penerima program bantuan, dikarenakan ada saja halangan yang dialami oleh masyarakat penerima yaitu seperti pekerjaan sehari-hari. Namun manfaat dari program bantuan BSPS ini sangat dirasakan masyarakat di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang. Sehingga dampak dari masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni dapat menjadi acuan untuk kedepannya.

Dilihat dari kesiapan Suprastruktur yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Pemerintah desa dari aspek Administrasi sudah berjalan semestinya. Karena tenaga Fasilitator yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan telah mengikuti pelatihan sebelum mereka menjadi Fasilitator dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sumber Daya Manusia pada aparaturnya yaitu para Fasilitator memadai karena dilihat juga dari lulusan Sarjana Teknik Arsitek maupun Teknik Sipil. Sumber Dana BSPS juga tersedia langsung dari bank dan di transfer langsung ke toko penyalur. Akan tetapi, ada juga bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima.

Contohnya ada pintu dan jendela yang tak kunjung sampai ke penerima bantuan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahsan dari hasil penelitian pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yang ada di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, maka berikut ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan serta mengajukan saran.

### Kesimpulan

1. Adanya program BSPS yang sudah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan di Kecamatan Amurang Timur khususnya di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Swadaya No.13/PRT/M/2016 yakni pembangunan rumah yang mencakup perumahan swadaya yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemenuhan rumah swadaya ini di bagi ke dalam dua kategori, yakni pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Dapat disimpulkan bahwa program BSPS sudah disalurkan di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang, namun belum bisa dikatakan baik dikarenakan adanya kendala dilapangan berupa kurangnya swadaya dari masyarakat yang hanya kerja sendiri-sendiri serta suplay bahan bangunan toko yang tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan dan fasilitator.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program BSPS, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR) khususnya masyarakat di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian manfaat dari program ini dapat membantu masyarakat mendapatkan rumah yang layak huni. Meskipun masih didapati ada masyarakat yang masih dikategorikan mampu, namun tetap mendapatkan bantuan.

3. Unsur pelaksanaan program BSPS terbagi atas : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, KPA/Kepala Satker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penerima BSPS, Koordinator Fasilitator Wilayah (KORFASWIL), Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota (KORFAS KAB/KOTA), Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Toko/Penyedia Bahan Bangunan, Bank/Pos Penyalur, Penyedia Barang/Penyedia Jasa Konstruksi. Meskipun masih adanya keterlambatan pelaksanaan pembangunan karena, kurangnya pengawasan dari Dinas Kabupaten Minahasa Selatan, dan kurangnya peran dari pemerintah dalam mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi pelaksanaan program BSPS langsung di lapangan.

## Saran

1. Sebaiknya masyarakat yang ada di Kecamatan Amurang Timur khususnya di Desa Maluku dan Kelurahan Pondang lebih meningkatkan keswadayaan dalam bekerja sama dalam pembangunan BSPS agar bisa terlaksana dengan baik.
2. Pemerintah lebih teliti lagi dalam memilih Masyarakat yang akan menerima bantuan BSPS sehingga

tidak ada lagi masyarakat yang masih tergolong “mampu” menerima bantuan dan dapat lebih tepat sasaran lagi.

3. Diharapkan Pemerintah Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman kabupaten minahasa selatan lebih meningkatkan pengawasan pada saat pelaksanaan pembangunan agar program bantuan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedur dari Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulah, Syukur. 2007. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan. Ujung Pandang. Kumpulan Makalah Persadi.*
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang, Soemantiri, 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Bandung, Fokus Media.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta, Kencana.
- Cresswel, J.W. 2013. *Research Design (Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed)..* Edisi Revisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manullang, M. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Ahli Bahasa Manullang. Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Cetakan ke-36. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Munif, Arifin. 2009. *Rumah Sehat, Lumajang.* [www.inspeksianitansi.blogspot.com](http://www.inspeksianitansi.blogspot.com)
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Bandung: CV. Sinar Baru.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.